



**DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 17  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA**

**(Studi Kasus di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)**

**Oleh:**

**AFRIANTI MASA**

**NPM 217.01.09.1018**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

Afrianti Masa, 2021, NPM 21701091018, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Dampak Implementasi Perwali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman PBBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19 Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Dosen Pembimbing 1: Dra. Nurul Umi Ati, M.A , Dosen Pembimbing II: Drs Agus Zainal Abidin, M.Si

---

Penelitian ini untuk bertujuan mendeskripsikan tentang “Dampak Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19 terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru kota Malang).

Diakhir tahun 2019 dunia di hadapkan dengan bencana pandemi Corona Virus Disaese (Covid 19), Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena Virus Corona dan masih melawan Virus Corona salah satu wilayah yang terpapar covid-19 adalah Kota. Kebijakan Pembatasan sosial berskala besar yang ada di Kota Malang dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus covid-19, namun ternyata tidak semua hal bisa berjalan dengan baik tentang kebijakan ini. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif – kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan yang pertama untuk mengetahui implementasi peraturan walikota Malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19 dan yang kedua untuk mengetahui dampak implementasi Kota Malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19 terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di Kelurahan Dinoyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasinya masih kurang bisa diterapkan, karena kurangnya kepedulian oleh masyarakat terkadang dikelurahan atau digang-gang masih terdapat sebuah perkumpulan, bahkan yang tidak memakai masker, jadi bisa disimpulkan dimata masyarakat PSBB ini masih kurang dipahami masyarakat, Dan beberapa dampak Covid-19 terhadap pedagang kaki lima, diantaranya resiko terinfeksi virus covid-19, dampak pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan kurangnya pendapatan dan tidak terpenuhi kebutuhan hidup. faktor ini yang disebutkan dimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya covid-19 ternyata tidak hanya menyerang buruh pabrik, ojek online melainkan berdampak pula pada para pedagang kaki lima seperti pedagang buah, sayur, nasi goreng dan yang lainnya. Namun pada implementasi masih kurang bisa diterapkan, karena kepedulian masyarakat terkadang dikelurahan dinoyo masih terdapat sebuah perkumpulan, bahkan tidak memakai masker.

**Kata Kunci : *Dampak, Implementasi, Kesejahteraan, Covid-19***

## SUNMMARY

Afrianti Masa, 2021, NPM 21701091018, Administrative Sciences Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Impact of the Application of the Mayor of Malang Number 17 of 2020 concerning PBBB Guidelines in the Context of Accelerating the Handling of the Corona-19 Virus on the Welfare of the Street Vendors (Case Study in the Village) Dinoyo, Lowokwaru District, Malang City). Advisor 1: Dra. Nurul Umi Ati, M.A , Advisor II : Drs Agus Zainal Abidin, M.Si

---

This study aims to describe the "Impact of the Implementation of Malang Mayor Regulation Number 17 of 2020 concerning PSBB Guidelines in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19 on the Welfare of Street Vendors (Case Study of Dinoyo Village, Lowokwaru District, Malang City).

At the end of 2019 the world was faced with the Corona Virus Disease (Covid 19) pandemic, Indonesia is one of the countries affected by the Corona Virus and is still fighting the Corona Virus. One of the areas exposed to Covid-19 is the City. The large-scale social restriction policy in Malang City is intended to prevent and minimize the spread of the covid-19 virus, but apparently not everything can go well with this policy. To find out the type of research used is descriptive - qualitative research with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The first objective is to find out the implementation of Malang mayoral regulation number 17 of 2020 regarding guidelines for large periodic social restrictions in the context of accelerating the handling of the corona virus-19 and secondly to determine the impact of implementing Malang City number 17 of 2020 concerning guidelines for large-scale social restrictions in order to accelerate handling corona virus-19 on the welfare of street vendors in Dinoyo Village. The results of the study show that the implementation is still not applicable, because of the lack of awareness by the community, sometimes in the urban village or in the alleys there are still groups, even those who do not wear masks, so it can be concluded that in the eyes of the people of PSBB this is still poorly understood by the community, and some of the impacts of Covid-19 against street vendors, including the risk of being infected with the covid-19 virus, the impact of large-scale social restrictions that cause a lack of income and not meeting the necessities of life. This factor is mentioned where the impact caused by the Covid-19 does not only attack factory workers, online motorcycle taxis but also has an impact on street vendors such as fruit, vegetable, fried rice traders and others. However, the implementation is still not applicable, because of community awareness, sometimes in the Dinoyo sub-district there is still an association, not even wearing a mask.

**Keywords:** *Impact, Implementation, Welfare, Covid-19*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Diakhir tahun 2019 dunia di hadapkan dengan bencana pandemi Corona Virus Disaese (Covid 19), Virus ini bermula dari Wuhan Cina yang diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan oleh manusia sehingga terjadi penularan terhadap manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena Virus Corona dan masih melawan Virus Corona begitupun dengan negara-negara yang lain yang terus berusaha menemukan vaksin untuk penyembuhan warganya yang terpapar Virus Corona.

Sebagaimana mengutip dari (<https://stoppneumonia.id/informasitentang-virus-corona-novel-coronavirus/>). Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernapasan, mulai flu biasanya hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syin drom (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat/ savere acute respiratory syndrome (SARS). Corona Virus jenis baru yang di temukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Savere Acute Respi ratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona virus Disease-2019 (Covid 19).

Jumlah Negara yang terjangkit Virus Corona Ditahun 2020 Mencapai 193 negara didunia di luluh lantakan karna dampak Covid-19, yang berpengaruh segnitifikan terhadap aktivitas perekonomian, pendidikan bahkan dalam kehidupan sosial masyarakat sebagaimana di Kutip (<https://travel.detik.com/travel-news/d-5083089/daftar-negara-yangterjangkit-virus-corona-terbaru-ini-jumlah->

*kasusnya*). Dilematis dunia dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), telah menjadi perhatian khusus bagi setiap negara.

Tak terlepas juga dengan Indonesia turut merasakan penularan Covid-19, kasus pertama di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, tentu saja bukan hal yang mengejutkan meskipun penerbangan dari Wuhan (sebagai tempat asal virus Covid-19) belum ditutup hingga jumlah kasus yang terkonfirmasi meningkat signifikan.

Ragam strategi dunia dalam menangani Virus Corona (Covid-19), demi melindungi warganya dari tertularnya Covid-19, langkah-langkah terus dilakukan mulai dari menciptakan vaksin maupun kebijakan yang dibuat untuk mencegah penyebaran Virus Corona, seperti Social Distancing dan Lockdown dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Dalam penanganan pandemi virus corona langkah yang di ambil berbagai negara di dunia menggunakan pendekatan Lockdown Social Distancing PSBB (Pembatasan sosial berskala besar). Tujuan di terapkan Lockdown ini supaya melakukan karantina penuh atau penutupan akses di wilayahnya demi menekan tersebarnya Covid-19, sementara PSBB lebih membatasi interaksi antar penduduk bertujuan dimana meminta warga tidak memalukan kontak fisik yang terlalu dekat karena akan menimbulkan indikasi penyebaran virus lewat tetesan air liur.

Menurut Lee dalam Herliandry (2020) wabah ini memiliki akhir yang berbeda di setiap negaranya bergantung pada kebijakannya yang ditetapkan dalam ketanggapan pemerintah dalam meminimalisir penyebarannya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran covid-19 diantaranya pemberlakuan *social distancing*, *physical distancing* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah salah satunya Kota Malang. Kebijakan tersebut

dikeluarkan untuk mengurangi penyebaran covid-19 yang berdampak di berbagai bidang di dunia khususnya perekonomian di Indonesia.

Sebagaimana dikutip Muzakir, M. Aftrar Ismail (2020) dalam artikel di akses pada (<https://mediaindonesia.com/read/detail/302400-benang-merah-lockdown-dan-social-distancing>). Beberapa negara di antara lain, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, India dan Tiongkok pada umumnya dan negara Eropa seperti Italia, Inggris, Jerman, menerapkan Lockdown, Social Distancing dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang di antaranya negara dunia antara lain Singapura, Korea Selatan dan Indonesia. Demi melindungi warganya dari penularan pandemi Covid-19. Pedagang kaki lima adalah orang-orang dari golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, yang berupa makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil dan mereka juga biasanya menggunakan modal sendiri atau pinjaman, waktu tidak teratur, lokasi tidak pasti, dan pengonsumsi relatif dari masyarakat menengah ke bawah.

Perdagangan sendiri merupakan aktivitas bisnis yang sangat fundamental. Kenyataannya menunjukkan bahwa usaha kecil sendiri adalah penyumbang besar pada kekuatan ekonomi negara dan terbukti pada saat resesi ekonomi pada tahun 1985 dan 1997. Pada saat pabrik-pabrik mulai merasakan efek dari kemunduran ekonomi dan memecat para pekerja, sedangkan para pemilik usaha kecil masih tetap bertahan. Jika kita tinjau lebih jauh lagi bahwa selama ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam membentuk perkembangan usaha kecil dengan berbagai macam program pengembangan dan pembinaan usaha kecil itu sendiri. Tetapi masih ada juga permasalahan yang masih dihadapi para usaha kecil saat ini, salah satunya yaitu dalam bidang pemasaran.

Semenjak wabah Covid-19 merebak di Indonesia, bisnis-bisnis kecil terutama pedagang kaki lima terancam mengalami kerugian. misalnya saja pedagang lumpia, pengusaha kopi, dan juga pedagang kecil lain yang membutuhkan interaksi langsung. orang-orang tidak akan keluar rumah dan akan menghindari kontak fisik langsung untuk mengurangi penyebaran.

Adapun langkah-langkah pemerintah indonesia dalam mengatasi pandemi Covid19 sebagaimana mengutip dari (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/aparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>).

1. Pemerintah indonesia membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan pos lintas batas darat negara (PLBDN).
2. Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara.
3. Sejak tanggal 18 januari 2020 indonesia telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sekitar 135 bandar udara, didarat dan pelabuhan.
4. Pemerintah melalui kementri kesehatan telah melakukan tiga langkah pencegahan masuknya virus corona kewilayah Indonesia yaitu :
  - a. Menertibkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kab/kota, RS rujukan, kantor kesehatan (KPP) dan balai teknik kesehatan lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini,

- b. Menempatkan 135 thermal scanner card bandar udara di indonesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke tiongkok.
  - c. Memberikan hak health alert card dan komunikasi, informasi, dan edukasi KIE pada penumpang.
5. Kementerian kesehatan juga telah menunjukkan seratus rumah sakit rujukan dan kementerian kesehatan menyiapkan satu kapsul evakuasi.
  6. Kementerian kesehatan telah mengembangkan pedoman kesehatan mengacu pada pedoman sementara yang di susun oleh WHO.
  7. Kementerian kesehatan membuka kontak layanan yang di akses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona.
  8. Pada tanggal 2 februari pemerintah indonesia mengumumkan penunndaan seluruh penerbangan dari dan RRT.
  9. Penilaian perwakilan WHO di indonesia mengenai kesiapan menghadapi Covid-19.
  10. Sebagai bentuk perlindungan pemri telah memulangkan WNI dari provinsi Hubei.

Pemerintah dituntut segera mungkin melakukan aksi nyata dalam menangani Covid-19 di negeri ini maka, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dalam Covid-19 dengan penanganan Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 dan Keputusan Presiden (KAPRES) Nomor 11 tahun 2020. Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai PSBB mulai dari Sekolah, Bekerja, dan Beribadah dilakukan di Rumah serta masyarakat di larang berkerumunan.

Di era pandemi Covid-19 semua warga masyarakat mempunyai suara dan pengambilan keputusan, baik secara langsung melalui lembaga-lembaga pengambilan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Di era Covid-19 tentunya lembaga pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Kebijakan Pembatasan sosial berskala besar yang ada di Kota Malang tentu dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19, namun ternyata tidak semua hal bisa berjalan dengan baik tentang kebijakan ini, Dampak dari diberlakukannya kebijakan PSBB adalah industri, usaha dan mata pencaharian menjadi tersendat yang salah satunya Pedagang Kaki Lima di Kelurahan dinoyo pun ikut merasakan dampak dari adanya kebijakan PSBB, dimana pendapatan pedagang kaki lima menjadi merosot akibat adanya kebijakan PSBB yang mengatur tentang pembatasan jumlah pembeli, pembatasan waktu berjualan, pembatasan jarak antar pembeli, tidak dibolehkannya ada tempat duduk bagi pembeli dan lain sebagainya. Dengan adanya penurunan penghasilan tentu akan mengakibatkan masalah-masalah yang muncul seperti tidak bisa membayar uang sewa rumah atau uang kreditan kendaraan, tidak bisa membeli bahan-bahan baku, tidak adanya modal untuk berjualan, berkurangnya atau tidak ada pendapatan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari hingga yang paling parah harus menutup usaha (jualannya) karena penurunan penghasilan yang drastis.

Permasalahan yang dialami oleh pedagang kaki lima di Kelurahan dinoyo mengharuskan pemerintah perlu mengetahuinya. Kebijakan PSBB pun juga berdampak kepada memburuknya perekonomian masyarakat salah satunya perekonomian para pedagang kecil. Mereka perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sasaran bantuan oleh pemerintah di masa wabah covid-19. Kondisi ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian karena sangat rentan dengan penyebaran wabah covid-19 yang akhir-akhir ini

menimbulkan keresahan seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tegas diungkapkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Sulistiawati, 2012). Selain itu, perlu adanya pembangunan pada bidang ekonomi bagi pedagang kecil yaitu dengan pemerintah mengupayakan kesejahteraan bagi para pedagang dan perlindungan di tengah wabah pandemi korona saat ini. hal tersebut akan menjadi penguat bagi pedagang kecil yang tetap bekerja saat musim covid-19. Sulistiawati (2012) menjelaskan pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak dari covid-19 ini melemahkan ekonomi di negara indonesia akibat ditutupi segala akses pekerjaan yang membuat masyarakat berkurang atau tidak memiliki penghasilan terlebih untuk para pendiri sektor informal dimana menjajakan penjualannya dengan berada diluar ruangan.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Dampak Implementasi Perwali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19 Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus di Kelurahan Dinoyo)”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat di rumuskan beberapa masalah yang mendorong dilakukan penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana implementasi peraturan walikota malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19?

2. Bagaimana dampak implementasi kota malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19 terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di Kelurahan Dinoyo?

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu bentuk konsentrasi sebagai pedoman dalam penelitian untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk pedoman dalam pembahasan atau Analisa sehingga penelitian mendapatkan hasil yang benar-benar diinginkan. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan dan tidak relevan, agar penelitian tertuju pada satu titik yang sudah ditentukan dan tidak menyimpang (Moloeng: 2000).

Sehingga berdasarkan uraian diatas fokus penelitian ini, penulis membuat fokus permasalahan yang akan diteliti, dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam memilih data yang relevan dan data yang tidak akan digunakan dalam pembahasan, karena banya data yang diperoleh. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Memfokuskan pada implementasi Peraturan Walikota Malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19.
  1. Gambaran perwali
  2. Tugas Satpol PP
  3. Tugas pedagang kaki lima dalam melaksanakan Peraturan Walikota
2. Memfokuskan Dampak Implementasi Kota Malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan

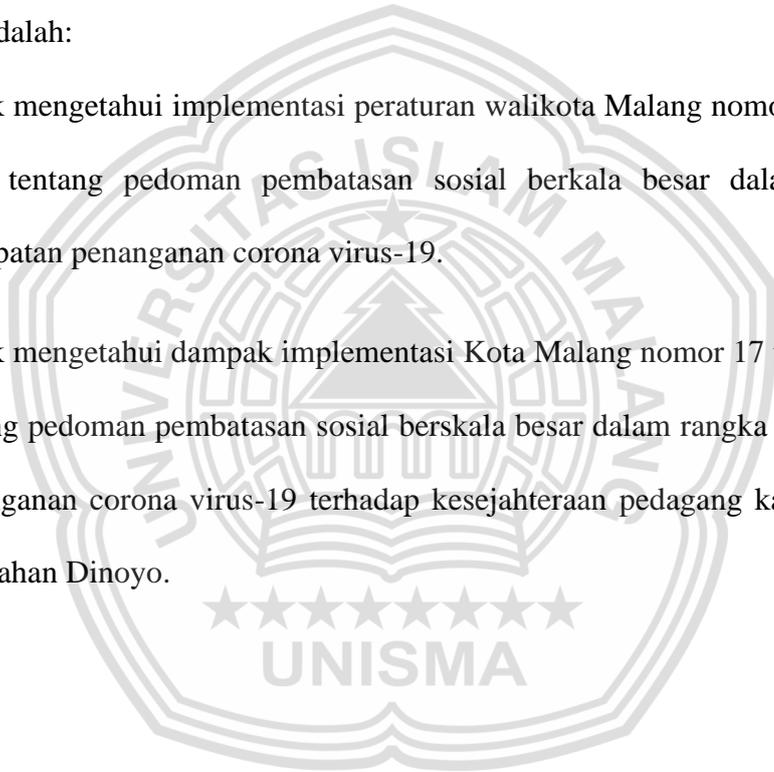
penanganan corona virus-19 terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di Kelurahan Dinoyo.

1. Jangka Waktu
2. Jumlah Pedagang yang berjualan
3. Tingkat Penghasilan

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan walikota Malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berkala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi Kota Malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19 terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di Kelurahan Dinoyo.



## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian di samping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian mengenai dampak perwali tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima.
- b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin membuat skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

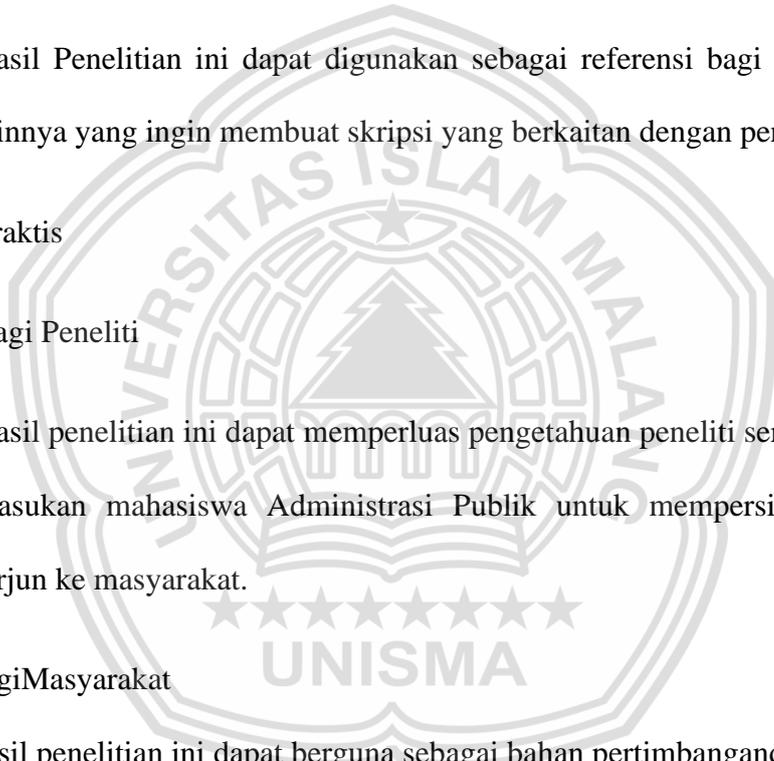
### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Administrasi Publik untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat.

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan informasi bagi pedagang kaki lima, satpol pp dan pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB 7

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dari hasil analisis pembahasan Dampak Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19 Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan walikota Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus-19
  - a. Implementasi peraturan walikota  

Implementasinya masih kurang bisa diterapkan, karena kurangnya kepedulian oleh masyarakat terkadang dikelurahan atau digang-gang masih terdapat sebuah perkumpulan, bahkan yang tidak memakai masker, jadi bisa disimpulkan dimata masyarakat PSBB ini masih kurang dipahami masyarakat. Dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan vorna virus-19 pada pedagang kaki lima di kelurahan dinoyo dalam kegiatannya dengan melakukan sosialisasi, patroli yang sudah terlaksana, namun pedagang kaki lima banyak yang acuh daalam pemberian pengetahuan tersebut.
2. Dampak peraturan walikota Malang nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus-19 terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di Kelurahan Dinoyo

a. Jangka waktu

Seperti yang disampaikan diatas, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah bidang ekonomi, Pemerintah harus melihat dampak yang ada, dan memperbaiki dengan cepat jika ada aturan yang sebenarnya dapat lebih meringankan, Namun tetap meneruskan bahkan memperkuat jika aturan yang dijalankan ternyata memberikan hal positif.

b. Jumlah pedagang yang berjualan

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tentunya memiliki resiko yang cukup bedsar terhadap penghasilan pedagang kaki lima. akibat adanya PSBB pedagaang kaki lima mendapatkan larangan jualan untuk berdaagang di tengah covid-19 ini. Pedagang kaki lima kembali berjualan jika Satpol PP tidak ada ditempat, dengan itu dilakukan dengan alasan jika mereka tidak berdagang maka mereka tidak makan.

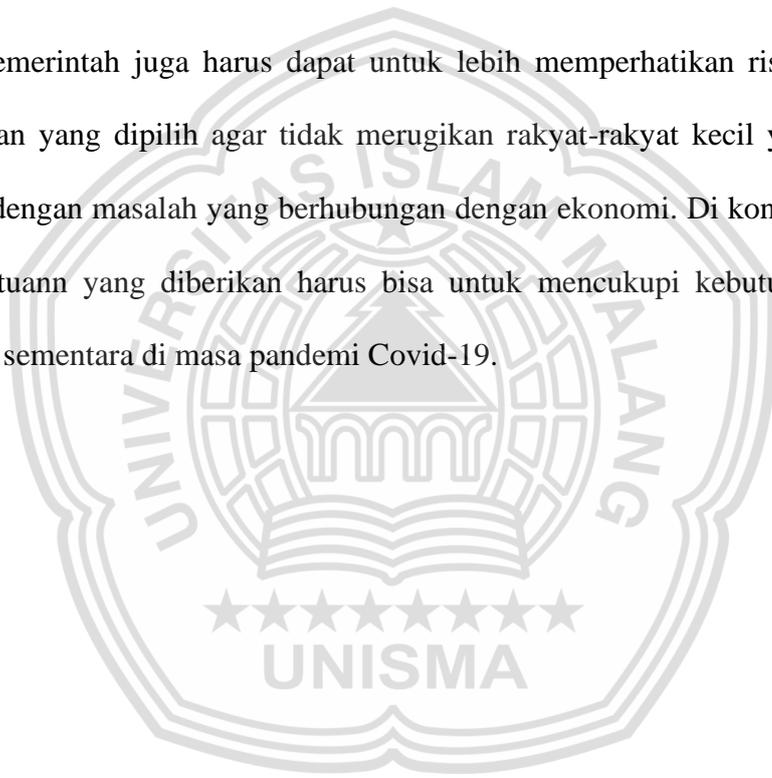
c. Tingkat penghasilan

Penurunan penghasilan tentunya memunculkan dampak terhadap tidak terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para pedagang kaki lima karena mereka sangat bergantung pada penghasilan harian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum terjadinya pandemi covid-19 para pedagang kaki lima merasa cukup untuk memnuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Semenjak terjadinya covid-19 dan terjadi penurunan penghasilan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penulis memberikan beberapa saran baik yang bisa memberikan masukan untuk kedepannya.

1. Bagi pedagang kaki lima (PKL) lebih memperhatikan resiko kesehatan terkait virus covid-19, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, demi menghentikan gelombang virus covid-19, karena jika tidak maka keluarga kalian lah juga beresiko tertular virus Covid-19.
2. Bagi pemerintah juga harus dapat untuk lebih memperhatikan risiko terkait kebijakan yang dipilih agar tidak merugikan rakyat-rakyat kecil yang sudah rentan dengan masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Di kondisi seperti ini bantuann yang diberikan harus bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sementara di masa pandemi Covid-19.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Hayat. (2017). *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi) Edisi Pertama*.

Malang:instrapublishing

Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Karmanis, dan Karjono. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Semarang, CV. Pilar Nusantara

Riant Nugroho, dkk. (2020). *Dampask Covid-19 pada ekonomi pendekatan strategi ketahanan pangan*, Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan rumah reformasi kebjakaan

Siagian (2018:75), *Filsafat Ilmu Administrasi*, Jakarta: PT Bumi aksara

### JURNAL :

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.

Intan, Fadhilla. (2020). Upaya Pedagang Kaki Lima dalam Mengatasi Terpaan

Jordian, Ary. (2014). Implementasi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2000 Volume 10, No. 1 Juni 2020Berita Penyebaran Covid-19 di Televisi Vol 5, No 2. Hal 2-3.

Karunia, A. M. (2020). Dampak Covid-19, Menaker: Lebih dari 2 Juta Pekerja Di-PHKdanDirumahkan.Kompas.Com.[https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker\\_lebih-dari-2-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan](https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker_lebih-dari-2-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan)

Lexy. G. Meleong. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakarya, 2001. Buhkari, “Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi”, Vol.11. No. 1 Juni 2017 Banda Aceh: U

Luqman, Al-Hakim. (2020). Dampak covid-19 dan kebijakan PSBB Pemerintah terhadap UMKM di Wiyung Surabaya niversitas Syiah Kuala

Milles dan Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm, 16.

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Neti, Sunarti (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Vol 2, No2

Prasetya, Mochammad Aringga & Luluk Fauziah. (2016). “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, JKMP Vol. 4, No. 2.

Rina, Milasandi. (2018). Dampak sosial ekonomi lokalisasi pedagang kaki lima (pkl)

Sendy Agus Setyawan, Ashari Almaida, Ema Julpia Aenun, Nanda Rizka Billah ,Glendina Clara & Harjito 2019. *Analisis Pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Penurunan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menggunakan Decision Tree*. Jurnal Universitas Negeri Semarang Volume 13, Hal. 4-5.

Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wahyu Edy Setyawan. (2020). *Pendampingan Pemasaran Usaha Pedagang Kaki Lima Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya* Jurnal Pengabdian Kampus Vol 7. No.2, 18-24

#### SITUS RESMI :

Peraturan walikota malang nomor 17 tahun 2020

<https://covid19.hukumonline.com/2020/05/14/peraturan-wali-kota-malang-nomor-17-tahun-2020>

Polres Malang. (2020, Mei 17). Paparan Kapolres Malang dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Hukum Polres Malang.

